

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : II
- Jenis Rapat : Audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro
Provinsi Jawa Timur
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Februari 2020
- Waktu : 11.00 s.d. 12.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 2 DPR RI, Senayan, Jakarta
- Ketua Rapat : Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.PA. (Anggota Komisi IV DPR
RI/F.PKB).
- Acara : Menerima Audiensi
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : Hadir Tamu:
1. Mitroku (Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 2. Dwi Priyo (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 3. M. Suparno (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 4. Lasuri (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 5. Sally A. (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 6. Sigit (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 7. Agus S. (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 8. Sudiyono (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
 9. Donny Bayu S. (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);

10. Agus Dita Pratama (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
11. Choirul Anam (Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur);
12. Eko Prabowo (Sekretaris);
13. Tri Rahayu;
14. Suharjo.

I. PENDAHULUAN

1. Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. menerima audiensi dari Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur konsultasi untuk menambah referensi dalam pengambilan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibuka pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Selanjutnya Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur menyampaikan permasalahan dan konsultasi untuk menambah referensi dalam pengambilan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta permasalahan berkurangnya kuota pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur, antara lain:
 - a. Pupuk subsidi sangat dibutuhkan oleh petani yang salah satunya adalah petani desa hutan dan petani pemajekan.
 - b. Alokasi pupuk bersubsidi oleh pusat dikurangi. pada Tahun 2019 total alokasi sebesar 183 ribu ton sedangkan Tahun 2020 sebesar 83 ribu ton.
 - c. Pengurangan alokasi disebabkan adanya surat BPN yang mengindikasikan adanya perbedaan jumlah lahan sehingga mengurangi alokasi secara nasional.
 - d. Masyarakat Bojonegoro mayoritas pekerjaan adalah 70% petani sawah ladang hutan.
 - e. Jika alokasi pupuk dikurangi maka dapat diasumsikan petani yang hanya memiliki 1/2 ha tidak mendapatkan keuntungan yang mencukupi.
 - f. DPRD Kabupaten Bojonegoro mengharapkan agar ada tambahan alokasi.
 - g. Mendukung kinerja Pemerintah untuk merampingkan distribusi pupuk bersubsidi dengan mengadakan Program Kartu Tani. Namun Kartu Tani masih belum optimal digunakan.
 - h. Meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait dengan pengawasan terhadap alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan data dari BPN.
 - i. Diharapkan agar kuota pupuk bersubsidi tidak terlalu besar (diharapkan mendekati tahun 2019).

- j. Dibutuhkan kesepakatan regulasi dalam memberdayakan petani di lingkup pascapanen dan hilirisasi pertanian, sehingga keinginan untuk memproduksi sangat besar.

III. KESIMPULAN

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga mitra Komisi IV DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP.196301221991031001